



Kementerian PPN/
Bappenas

Buku Rujukan **Pelibatan Aktor** **Non-Pemerintah Dalam** **Pelaksanaan SDGs** **di Tingkat Daerah**



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2024



Kementerian PPN/
Bappenas

Buku Rujukan

Pelibatan Aktor Non-Pemerintah
Dalam Pelaksanaan SDGs di
Tingkat Daerah



Buku Rujukan

Pelibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyelaras Akhir : Vivi Yulaswati, Yanuar Nugroho

Reviewer : Pungkas Bahjuri Ali, Yanuar Nugroho

Tim Penyusun : Setyo Budiantoro, Rachman Kurniawan, Sanjoyo, Gantjang Amanulah, Nasokah, Zulazmi, Marvel Josef Petrus Ledo, Chiquita Abidin, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dwita Dibyareswati, Fitriyani Yasir, Alimatul Rahim, Danya Wulandari Joedo, Diky Avianto, Adenira Hargianintya.

Tim Pendukung : Eneng Fathonah, Fredrick Ellia Gugkang, Yoakim Asy, Bobby Rantow Payu, Anita Wahyuni, Abdul Halim, Hapsari Octaviani.

Layout/Desain : Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditargetkan untuk dapat dicapai secara keseluruhan pada tahun 2030 membutuhkan keterlibatan aktif seluruh aktor pembangunan khususnya aktor pembangunan non-pemerintah. Melalui keterlibatan secara kolaboratif, dimana seluruh aktor mengambil peran dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, akan memberikan dampak hasil yang lebih besar. Sehingga pencapaian tujuan SDGs dapat terealisasi dalam waktu yang lebih cepat.



Namun demikian, upaya pelibatan aktor non-pemerintah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi pemerintah daerah. Membangun keterlibatan aktor non-pemerintah memerlukan upaya yang sistematis dan terarah. Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang komprehensif bagi pemerintah khususnya bagi pemerintah daerah tentang peta aktor non-pemerintah, peran dan kontribusinya dalam pencapaian SDGs. Untuk kebutuhan tersebut, maka disusunlah **Buku Rujukan Pelibatan Aktor Non-pemerintah dalam Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah.**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga terselesaikannya buku rujukan ini dengan baik. Buku ini merupakan hasil kerjasama antara Bappenas dan Pemerintah Jerman melalui Proyek SDGs SSTC yang diimplementasikan oleh GIZ Indonesia dan ASEAN. Buku rujukan ini disusun melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak dan telah melalui uji penerapan di empat provinsi percontohan yaitu Gorontalo, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat. Dengan adanya buku rujukan ini, kami berharap akan dapat membantu memaksimalkan upaya pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di daerah yang pada akhirnya akan meng-akselerasi pencapaian tujuan SDGs di daerah tersebut.

Jakarta, Mei 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pungkas Bahjuri Ali'.

Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,
selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Gambar	IV
Daftar Tabel	V
Daftar Singkatan	VI

PENDAHULUAN 1

1	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Tujuan Penyusunan	3
	1.3. Ruang Lingkup	4

MEMAHAMI AKTOR PEMBANGUNAN NON-PEMERINTAH 5

2	2.1. Definisi dan Bentuk-Bentuk Aktor Pembangunan Non-pemerintah	7
---	--	---

ARTI PENTING, PERAN DAN KONTRIBUSI AKTOR NON-PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN SDGs DI TINGKAT DAERAH 11

3	3.1. Arti Penting Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Pelaksanaan SDGs	13
	3.2. Peran dan Peta Kontribusi Aktor Non-Pemerintah dalam Pelaksanaan SDGs	14

KERANGKA KERJA PARTISIPASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN SDGs 11

4

5

Tahap 1. Persiapan	27
Tahap 2. Perencanaan	30
Tahap 3. Pelaksanaan	34
Tahap 4. Evaluasi	36

Daftar Pustaka38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Spektrum partisipasi publik dalam pelaksanaan SDGs	24
Gambar 2. Proses pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs	27
Gambar 3. Peta Analisa Pemangku Kepentingan	29
Gambar 4. Jenis-jenis komunikasi	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target SDGs yang Terkait Langsung dengan Kebutuhan Penelitian	17
Tabel 2. Matrik analisa pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan	29
Tabel 3. Pembacaan hasil analisa dan sikap terhadap pemangku kepentingan	30
Tabel 4. Contoh matrik rencana kerja pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah	31
Tabel 5. Contoh matrik jadwal pelaksanaan kegiatan pelibatan	33
Tabel 6. Monitoring pelaksanaan proses pelibatan	35
Tabel 7. Matrik evaluasi pelaksanaan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs	37

DAFTAR SINGKATAN

BPS

Badan Pusat Statistik

CSO

Civil Society Organization

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

MDGs

Millennium Development Goals

NGO

Non-Governmental Organization

NSA

Non-State Actor

Ormas

Organisasi Kemasyarakatan

SDGs

Sustainable Development Goals

TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UMB

Usaha Menengah Besar



1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kerangka kerja pembangunan global yang disepakati oleh para pemimpin dunia pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 yang berisikan 17 tujuan yang terintegrasi dan ditargetkan untuk dapat dicapai pada 2030 mendatang. Untuk pelaksanaannya, para pemimpin dunia menyadari bahwa untuk dapat merealisasikan seluruh tujuan tersebut tidak hanya mengandalkan peran pemerintah semata, akan tetapi juga membutuhkan peran dan kontribusi aktor pembangunan non-pemerintah yaitu sektor usaha, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan akademisi.

Kesadaran akan pentingnya pelibatan semua aktor pembangunan untuk mengambil peran dan berkontribusi pada pencapaian agenda 2030 kemudian diartikulasi menjadi prinsip inklusif (*inclusiveness*) dan kemitraan (*partnership*) dalam pelaksanaan SDGs. Prinsip inklusif berarti bahwa semua pihak dapat berkontribusi pada pencapaian agenda 2030 sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sedangkan prinsip kemitraan diartikan bahwa pencapaian agenda 2030 tidak mungkin dapat dicapai kecuali melalui kerja sama semua pihak.

Guna memaksimalkan peran dan kontribusi non-pemerintah dalam percepatan pencapaian tujuan agenda 2030 sesuai dengan target dan indikator yang disepakati, maka dibutuhkan pemahaman akan peta aktor non-pemerintah, peran dan kontribusinya dalam SDGs serta langkah-langkah praktis untuk melibatkan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, khususnya bagi tim koordinasi pelaksanaan SDGs daerah dan juga sekretariat SDGs baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam memahami karakteristik aktor pembangunan non-pemerintah, peran dan kontribusinya dalam pelaksanaan SDGs. Selain itu, juga bertujuan memberikan panduan kepada mereka tentang bagaimana teknis pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs secara mudah dan sistematis. Dengan demikian, diharapkan buku rujukan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun komitmen, keterlibatan dan kerjasama dengan aktor non-pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian tujuan SDGs di tingkat daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan

Buku rujukan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan referensi bagi

pemerintah daerah, khususnya bagi tim koordinasi daerah dan sekretariat SDGs di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tentang teknis pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari buku rujukan ini adalah:

1. sebagai rujukan bagi pemerintah daerah khususnya bagi tim koordinasi pelaksanaan SDGs daerah dan sekretariat SDGs di tingkat daerah dalam memahami peta aktor non-pemerintah, peran dan kontribusinya dalam pencapaian pelaksanaan SDGs;
2. sebagai rujukan bagi pemerintah daerah, khususnya bagi tim koordinasi pelaksanaan SDGs daerah dan sekretariat SDGs di tingkat daerah dalam memahami langkah-langkah teknis bagaimana cara melibatkan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah.

Namun demikian, walaupun buku ini dimaksudkan sebagai rujukan untuk menarik dan membangun keterlibatan aktor pembangunan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs, bukan berarti hanya dapat digunakan oleh aktor pemerintah saja. Buku rujukan ini juga dapat digunakan oleh aktor non-pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktor non-pemerintah lainnya dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah.

1.3. Ruang Lingkup

Buku rujukan teknis pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah ini terdiri dari lima bagian penting yang berupa:

1. Pendahuluan yang terbagi menjadi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup.
2. Arti penting pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di daerah.
3. Memahami aktor non-pemerintah, peran dan kontribusinya dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah.
4. Kerangka kerja partisipasi aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.
5. Tahapan pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di daerah.



2

MEMAHAMI AKTOR PEMBANGUNAN NON- PEMERINTAH



2.1. Definisi dan Bentuk-Bentuk Aktor Pembangunan Non-pemerintah

Aktor pembangunan non-pemerintah dalam hal ini diartikan sebagai kelompok, gerakan, organisasi atau individu yang mana mereka adalah bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah. Secara umum, aktor pembangunan non-pemerintah dalam konteks SDGs di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 merujuk pada organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi dan akademisi.

Definisi dan uraian dari masing-masing bentuk dari aktor non-pemerintah sesuai dengan regulasi dan kondisi Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat Ormas, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dan Fungsi Ormas

Ketentuan Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82 Tahun 2013 menerangkan bahwa pembentukan organisasi masyarakat bertujuan untuk sejumlah hal. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan negara.

Kemudian, fungsi ormas adalah sebagai sarana:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.

2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan sosial.
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam khazanah umum, terdapat istilah lain yang sering kali dipakai untuk menyebut Ormas dalam definisi yang demikian, antara lain Organisasi Masyarakat Sipil/*Civil Society Organization/CSO*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Non-pemerintah/*Non-governmental organization/NGO* atau bahkan juga disebut *Not-for Profit Organization*.

Tujuan penting didirikannya Ormas antara lain untuk menjadi saluran partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ormas dilihat dari sisi bentuknya, dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dapat berupa perkumpulan atau yayasan. Ormas berbadan hukum perkumpulan, didirikan dengan basis anggota. Sedangkan yang berbadan hukum Yayasan, didirikan dengan tidak berbasis anggota. Ormas ditinjau dari ruang lingkungannya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga wilayah yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

2.1.2. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelaku usaha yang dimaksud dalam konteks ini meliputi pelaku usaha sektor swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sektor swasta dapat diartikan sebagai satu bagian dalam sektor ekonomi negara yang terdiri dari kegiatan di bidang usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh swasta, meliputi individu dan badan usaha. Badan usaha di sektor swasta antara lain berbentuk: perusahaan perseorangan, persekutuan komanditer (CV), perusahaan tertutup, perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki publik, dan koperasi. Sementara itu, BUMN adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara dan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, mengelola sumber daya negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain pelaku usaha yang bersifat individu dan berbadan hukum, dikenal juga asosiasi pelaku usaha.

2.1.3. Filantropi

Filantropi sebagai aktor pembangunan dalam konteks Indonesia, diidentikkan

dengan *foundation* atau yayasan yang bergerak pada pemberian dan penyediaan donasi bagi kemanusiaan. Selain pemberian donasi, filantropi juga sangat terkait dengan efektivitas bagaimana agar donasi yang diberikan dapat mendorong perubahan kolektif dalam masyarakat. Pemaknaan filantropi semakin berkembang, dan pada perkembangannya, filantropi dimaknai sebagai upaya berbagi sumber daya secara terorganisir untuk manfaat strategis jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam konteks SDGs, pada Perpres No 111/ 2022 disebutkan filantropi adalah setiap orang perseorangan atau Lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan.

Filantropi merupakan entitas mandiri yang terpisah dari pelaku usaha baik dalam pengelolaannya maupun dalam pengambilan keputusannya seperti LAZISMU, NU Care-LAZISNU, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan Yayasan Dompot Duafa. Meskipun demikian, di Indonesia terdapat banyak *foundation* yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA), Yayasan Bakti Barito, Yayasan Unilever Indonesia, dan lain-lain. Selain terkait dengan perusahaan, terdapat juga filantropi yang terkait dengan keluarga, seperti contoh Tanoto *Foundation* dan Eka Tjipta *Foundation*. Kesemuanya itu merupakan bagian dari lembaga filantropi.

2.1.4. Akademisi

Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Akademisi juga mencakup kelembagaan akademik yang terlibat dalam penyebaran pengetahuan dan keterampilan melalui penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kategori akademisian ini juga mencakup SDGs Center, sekolah swasta, universitas swasta, dan *training-training center*.



3

ARTI PENTING, PERAN DAN KONTRIBUSI AKTOR NON- PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN SDGS DI TINGKAT DAERAH



3.1. Arti Penting Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Pelaksanaan SDGs

Berikut adalah beberapa alasan pentingnya pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs (UN DESA and UNITAR, 2020: 31):

1

Keterlibatan aktor non-pemerintah dapat **memperkuat proses negosiasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan** baik pada level global, nasional maupun daerah. Aktor non-pemerintah memiliki banyak pengalaman dan keahlian dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

2

Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pelayanan publik seringkali menyasar kepada kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan. Mereka dapat **menjadikan pengalaman dan pengetahuan di bidang tertentu sebagai input perencanaan, memperbaiki pelaksanaan dan evaluasi.**

3

Kehadiran aktor non-pemerintah, sebagai aktor yang otonom dan mandiri, dapat **merepresentasikan gagasan dan kepentingan masyarakat** pada umumnya.

4

Pemangku kepentingan non-pemerintah dapat menjadi **saluran bagi kelompok-kelompok terpinggirkan** dan membantu memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka diperhitungkan.

5

Keterlibatan para pemangku kepentingan dapat **meningkatkan akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*) dan daya tanggap (*responsiveness*) pelaksanaan pembangunan.**

6

Keterlibatan aktor pembangunan non-pemerintah akan **meningkatkan dampak dan memperbesar jangkauan sasaran pembangunan**, khususnya pada kelompok akar rumput yang seringkali sulit dijangkau oleh pemerintah.

7

Para pemangku kepentingan dapat menggunakan indikator SDGs sebagai alat ukur status pelaksanaan SDGs dan **sebagai alat advokasi dan kegiatan di wilayah operasinya.**

8

Para pemangku kepentingan **dapat menyampaikan rekomendasi aturan, kebijakan dan program kepada pemerintah dan menilai kinerja pemerintah terhadap pelaksanaan SDGs.**

9

Keterlibatan dan kerjasama aktor non-pemerintah dapat **memberikan dampak kebijakan yang positif** bagi pelaksanaan dan pencapaian SDGs.

3.2. Peran dan Peta Kontribusi Aktor Non-Pemerintah dalam Pelaksanaan SDGs

Aktor non-pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan dan pencapaian Agenda 2030. Melalui keterlibatan aktif aktor non-pemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya dan dengan dukungan sumber daya yang dimilikinya, diharapkan akan mempercepat pencapaian tujuan SDGs di Indonesia.

3.2.1. Peran dan Kontribusi Organisasi Kemasyarakatan

Ormas memainkan berbagai peran penting dalam masyarakat, mulai dari advokasi, mobilisasi dan partisipasi dalam proses kebijakan, memastikan sistem akuntabilitas dapat berjalan dengan baik, hingga melengkapi tindakan negara dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.

Ormas dapat menciptakan solusi inovatif dan layanan alternatif bagi Negara dan bahkan berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran tentang tantangan lokal dan global dan mempromosikan tindakan untuk menyelesaikannya. Nilai tambah yang dimiliki Ormas adalah kedekatan mereka dengan masyarakat dan pengetahuan mereka terhadap kondisi masyarakat dampingan dimana mereka beroperasi. Dengan demikian, masyarakat sipil yang berdaya merupakan komponen penting bagi pelaksanaan SDGs.

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa peran Ormas dalam SDGs berupa:

1. Ormas dapat berperan dalam mengkomunikasikan dan meningkatkan kepedulian publik terhadap SDGs;
2. Sebagai agen publik dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan pengumpulan data, monitoring dan menyusun laporan perkembangan SDGs versi masyarakat sipil;
4. Menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
5. Membantu menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat.

3.2.2. Peran dan Kontribusi Pelaku Usaha

Kerangka kerja SDGs telah menetapkan prioritas pembangunan global dan menentukan aspirasi masyarakat dunia untuk 2030 serta berusaha untuk memobilisasi upaya global dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. SDGs menyerukan kepada pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk bersama-sama untuk mengakhiri kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang bermartabat bagi semua.

Berbeda dengan *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs secara tegas menyerukan kepada pelaku usaha untuk mengaplikasikan kreativitas dan inovasi mereka dalam rangka menyelesaikan tantangan-tantangan pembangunan berkelanjutan.

SDGs menghadirkan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menawarkan solusi inovatif, untuk mengembangkan, menggunakan teknologi untuk merespon dan menyelesaikan tantangan terbesar pembangunan berkelanjutan global.

Adapun peran yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan SDGs adalah sebagai berikut:

1. Integrasi ESG, CSV, dan CSR dalam Praktik Bisnis

Pelaku usaha berperan penting dalam pelaksanaan SDGs, antara lain dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), *Creating Shared Value* (CSV), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikaitkan dengan (aligning) dengan pencapaian indikator SDGs. Dengan cara ini, tidak hanya meningkatkan keberlanjutan operasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Misalnya, pengembangan produk yang berkelanjutan, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan program-program yang mendukung pembangunan masyarakat lokal.

2. Mendukung Pendanaan untuk Proyek Berkelanjutan

Pelaku usaha dapat mendukung pendanaan SDGs melalui berbagai cara, termasuk melalui langsung pada proyek-proyek yang mendukung SDGs, mengembangkan produk keuangan yang berkelanjutan, ataupun berperan aktif dalam memfasilitasi akses ke modal untuk usaha kecil dan menengah yang berfokus pada solusi berkelanjutan.

3. Meningkatkan Kapasitas Internal dan Eksternal

Meningkatkan kapasitas bukan hanya internal perusahaan tetapi juga di antara mitra dan masyarakat sekitar adalah kunci untuk mencapai SDGs. Ini bisa mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan, penyediaan sumber daya untuk penelitian dan inovasi, serta program pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Meningkatkan kapasitas ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung dan memelihara inisiatif berkelanjutan.

4. Menyebarkan Informasi Tentang SDGs

Pelaku usaha memiliki platform dan sumber daya untuk mendiseminasikan informasi tentang SDGs secara luas. Ini bisa dilakukan melalui kampanye pemasaran, publikasi, dan kerjasama media, yang tidak hanya menginformasikan

tetapi juga memotivasi dan menginspirasi pihak lain untuk terlibat. Menggunakan cerita nyata dan data yang menunjukkan dampak dari inisiatif SDGs dapat meningkatkan kesadaran dan menggerakkan aksi dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

5. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pencapaian SDGs

Pelaku usaha dapat mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk pelaksanaan SDGs. Melalui kemitraan strategis ini, mereka dapat membangun solusi yang lebih komprehensif dan berdampak, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan SDGs yang telah ditetapkan.

3.2.3. Peran dan Kontribusi Akademisi

Akademisi memiliki peranan penting dalam berkontribusi untuk pencapaian SDGs. Sesuai dengan Tri-Dharma perguruan tinggi, peran akademisi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan deskripsi masing-masing sebagaimana berikut ini:

1. Pendidikan dan pengajaran

Pendidikan merupakan salah satu tujuan penting dalam SDGs. Untuk itu, adanya pendidikan yang berkualitas itu sendiri merupakan manfaat dari pembangunan berkelanjutan yang dirasakan oleh individu, komunitas dan negara. Pendidikan juga merupakan alat untuk mendukung dan mempercepat kapasitas global dalam pelaksanaan SDGs. Dengan demikian, perguruan tinggi melalui pengajarannya di kampus, melalui *training-training* profesional, pendidikan tingkat eksekutif, pembelajaran daring, kegiatan ekstrakurikuler, dan kelompok-kelompok kajian mahasiswa, memegang peranan penting dalam pelaksanaan SDGs.

Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran tentang SDGs:

- A. Menyediakan pengetahuan, ketrampilan dan memotivasi mahasiswa untuk memahami dan menyelesaikan tantangan SDGs.
- B. memperkuat dan mengumpulkan mahasiswa dan anak-anak muda dalam memahami dan menginternalisasi SDGs dalam praktik kehidupan sehari-hari.
- C. menyediakan kurikulum dan *training* khusus untuk pengarusutamaan SDGs.
- D. membuka peluang peningkatan kapasitas bagi mahasiswa dan para profesional dari negara berkembang untuk menyelesaikan tantangan SDGs.

2. Penelitian dan pengembangan

Untuk pencapaian tujuan SDGs, komunitas global membutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kesulitan dan tantangan yang kompleks terkait isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan penelitian. Akademisi, melalui kegiatan dan pengalaman penelitiannya, memegang peranan penting dalam menyajikan pengetahuan, basis argumentasi, data, dan solusi serta inovasi untuk mendukung penyelesaian tantangan pembangunan yang dihadapi oleh penduduk dunia.

Beberapa target SDGs secara langsung menegaskan bahwa kebutuhan akan penelitian merupakan komponen kunci dalam pencapaian SDGs. Berikut adalah target SDGs yang terkait langsung dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan.

Tabel 1. Target SDGs yang Terkait Langsung dengan Kebutuhan Penelitian

Goal	Target	
2. Tanpa kelaparan	2.a	SDGs 2.a, 3.b, 7.a, 12.a, mengacu pada kebutuhan penelitian sains dan masukan untuk pertanian berkelanjutan, pengembangan vaksin, dan produksi dan konsumsi berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera	3.b	
7. Energi bersih dan terjangkau	7.a	
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung-jawab	12.a	
9. Industri, inovasi dan infrastruktur	9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara -negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.
	9.b	Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.

Goal	Target	
14. Ekosistem laut	14.3	SDGs 14.3, 14.4, 14.5, 14.a mengacu pada kebutuhan masukan sains untuk menyelesaikan masalah pengelolaan perikanan dan kelautan.
	14.4	
	14.5	
	14.a	
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
	17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh akademisi terkait dengan peran penelitian dan pengembangan:

1. mendorong dan mempromosikan SDGs sebagai topik penelitian di perguruan tinggi.
2. mendukung dan memfasilitasi solusi-solusi pembangunan berkelanjutan melalui penelitian.
3. secara aktif memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi SDGs di tingkat nasional dan daerah.
4. mengadvokasi dukungan nasional dan daerah, dan pengkoordinasian penelitian SDGs.
5. mendukung peningkatan kapasitas bagi negara atau daerah berkembang lainnya untuk melakukan penelitian dan menggunakan hasil penelitian SDGs.
6. Kerjasama antar perguruan tinggi atau SDGs center untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Pengabdian kepada masyarakat

Kontribusi perguruan tinggi di bidang pengabdian masyarakat dengan melakukan fasilitasi dan katalisasi keterlibatan publik melalui dialog dan aksi lintas-sektor, advokasi masyarakat, juga peningkatan komitmen para pemangku kepentingan terhadap implementasi prinsip dan perubahan perilaku serta gaya hidup dalam rangka mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Kampanye dan penerapan gaya hidup ramah lingkungan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab harus dilakukan sejak di lingkungan kampus. Inovasi green campus dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas untuk bisa diduplikasi dalam kehidupan dan aktivitas keseharian.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh akademisi dalam bidang pengabdian masyarakat untuk pencapaian SDGs adalah:

- A. Pengintegrasian SDGs ke dalam kuliah kerja nyata tematik.
- B. Pendampingan kepada para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pemantauan SDGs tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

3.2.4. Peran dan Kontribusi Lembaga Filantropi

Filantropi memegang peranan penting dan menjadi mitra utama dalam pelaksanaan SDGs. Kerja-kerja dan kontribusi filantropi secara alamiah sesuai dengan filosofi pembentukannya telah selaras dengan tujuan-tujuan SDGs. Dengan demikian, tentu mobilisasi sumber daya publik dan distribusinya dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan secara *real* di masyarakat telah mendukung percepatan pencapaian Agenda 2030.

Berikut adalah peran dan kontribusi lembaga filantropi dalam pelaksanaan SDGs:

1. Melakukan advokasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya SDGs.

Semakin banyak orang mengetahui SDGs, semakin banyak juga individu akan secara sukarela berkontribusi melalui donasi dan advokasi untuk perubahan. Komunikasi dengan target audien tentang SDGs, baik melalui media sosial, laporan, video, atau *interview*, akan sangat membantu memperluas jangkauan dukungan.

Komunikasi di era modern seringkali bersifat interaktif dan dapat digunakan tidak hanya untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai media mendengar dan belajar. Komunikasi dua arah atau komunikasi interaktif memberikan ruang untuk kepada lembaga filantropi mengidentifikasi masalah-masalah di masyarakat dan menemukan solusi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat untuk jangka panjang.

Pengakuan dan pembentukan *platform* keterlibatan filantropi dalam pelaksanaan SDGs telah memberikan ruang dialog yang intensif bagi filantropi dengan pemerintah terkait dengan perkembangan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan filantropi akan secara maksimal berkontribusi pada perbaikan kebijakan pembangunan.

2. Sharing pengetahuan, informasi dan literatur terkait dengan peran filantropi dalam SDGs.

Pembentukan *platform sharing* pengetahuan, informasi dan pengalaman telah mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif baru untuk pembangunan global. Melalui *platform* ini, dapat dilakukan pemetaan aktor filantropi, dipahaminya agenda kerja pembangunan masing-masing aktor dan pengetahuan para pemangku kepentingan.

Ketersediaan pengetahuan dan informasi, akan membantu menciptakan lingkungan ekosistem pembangunan yang lebih baik yang mana filantropi dapat berinvestasi, mengidentifikasi kepentingan bersama secara tematik, dan dapat menentukan isu potensial kerjasama.

3. Secara aktif melakukan kemitraan dengan berbagai aktor pembangunan lainnya.

Dengan sumber daya *financial* yang cukup, pengetahuan tentang bagaimana merespon persoalan sosial ekonomi masyarakat serta berbekal keterampilan yang memadai, filantropi dapat bekerja sama secara efektif baik dengan sesama filantropi maupun dengan berbagai aktor pembangunan lainnya dalam pelaksanaan program prioritas sesuai dengan SDGs.

Untuk kerja sama dengan internal sektor, filantropi dapat melakukan *tracking* perkembangan SDGs, melakukan penyusunan data, melakukan pengumpulan data, dan melakukan *sharing* pengetahuan melalui pertemuan-pertemuan, publikasi artikel atau menyusun laporan internal sektor filantropi. Kerjasama lintas sektor dapat dilaksanakan melalui penyaluran anggaran untuk advokasi perbaikan kebijakan publik dan meningkatkan pelaksanaan SDGs.

4. Melakukan mobilisasi dan distribusi sumber daya (keuangan) dalam mendukung pelaksanaan SDGs.

Lembaga filantropi memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Sesuai dengan filosofinya, lembaga filantropi hadir untuk memobilisasi sumber daya publik dan mendistribusikannya, -baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pihak lainnya-, kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan terkait dengan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Dalam konteks pelaksanaan SDGs, lembaga filantropi telah banyak melakukan *mainstreaming* SDGs dalam perencanaan program, evaluasi dan pelaporannya.



4

KERANGKA KERJA PARTISIPASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN SDGs



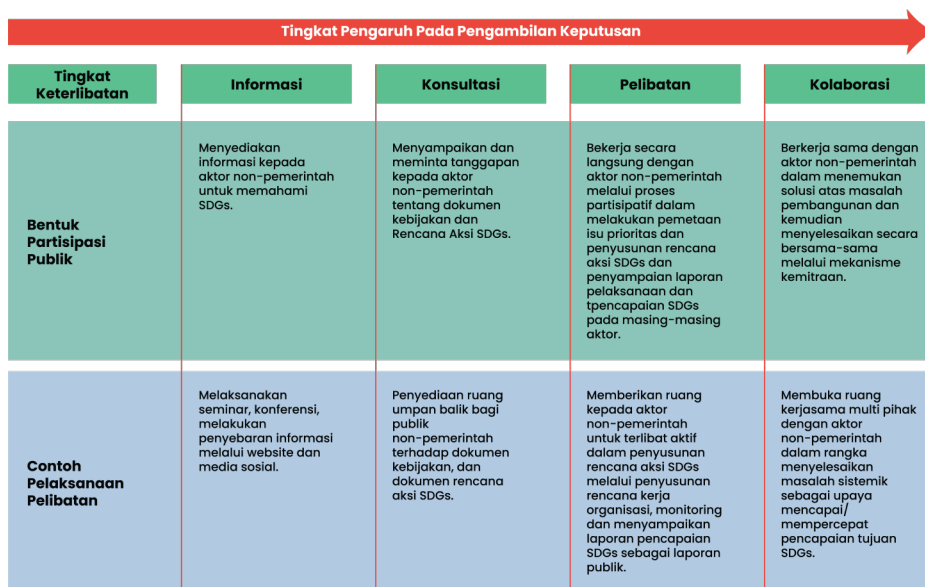
Proses pelibatan pemangku kepentingan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk semua aktor. Mereka memiliki tujuan, tanggung-jawab, jangkauan, dan harapan yang berbeda-beda. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menentukan pilihan level keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGs.

The International Association for Public Participation (IAP2, 2018) telah menyusun kerangka partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan telah menjadi standar acuan secara global. Kerangka partisipasi ini berupa peta spektrum keterlibatan publik dan tingkat pengaruhnya dalam penentuan keputusan dalam kebijakan publik.

IAP2 membedakan spektrum partisipasi publik ke dalam lima kategori partisipasi yang masing-masing berupa: informasi, konsultasi, pelibatan, kolaborasi dan pemberdayaan. Kategori tidak mewakili peringkat.¹ Spektrum mencerminkan tingkat intensitas partisipasi publik dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, spektrum tidak menunjukkan tingkat nilai terhadap tujuan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, menginformasikan publik adalah tujuan utama dari keterlibatan publik, sementara dalam kasus lain, pemberdayaan mungkin menjadi tujuan utamanya. Dalam pengertian ini, semua tujuan untuk partisipasi publik dianggap perlu dan memiliki nilai kontribusi yang sama tingginya dalam konteks pencapaian SDGs sesuai dengan karakter dan peran masing-masing pemangku kepentingan.

Namun demikian, pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs minimal mengacu pada 4 (empat) kategori partisipasi yaitu informasi, konsultasi, pelibatan dan kolaborasi. Untuk memahami secara utuh kerangka kerja partisipasi non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs, berikut adalah gambaran spektrum, uraian singkat dan disertai contohnya.

1 https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf, diakses pada 17 Oktober 2023.



Gambar 1. Spektrum partisipasi publik dalam pelaksanaan SDGs²

2 Diolah dari spekturm partisipasi publik IAP2. https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf, diakses pada 17 Oktober 2023.



5

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN NON PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN SDGs DI DAERAH



Proses pelibatan aktor pembangunan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah dapat dilakukan melalui empat tahapan sebagaimana gambar berikut:³



Gambar 2. Proses pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs

Secara rinci, masing-masing tahapan dan langkah pelibatan pemangku kepentingan non pemerintah diuraikan secara teknis sebagai berikut:



TAHAP 1. PERSIAPAN



Langkah 1.1. Menentukan tujuan pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs

Langkah awal pelibatan aktor nonpemerintah adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai dari pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di daerah. Rumusan tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang diharapkan dari pelibatan aktor non pemerintah akan menjadi bahan yang akan selalu dipantau, dievaluasi secara berkala dalam perjalanan pelaksanaan nantinya.

Pertanyaan penting yang dipertimbangkan untuk memandu dalam menentukan tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelibatan para pemangku kepentingan nonpemerintah adalah: (UNESCAP, 2018)

1. Apa tujuan utama dari pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs?
2. Hasil apa saja yang ingin didapatkan dari keterlibatan pemangku kepentingan tersebut?
3. Apa saja harapan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGs?

³ Rangkaian proses pelibatan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs ini disarikan dari UNDESA & UNITAR, 2020.

Sebagai panduan, tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelibatan diharapkan menjawab pertanyaan sebagai berikut: (UNESCAP, 2018)

1. Mengapa kita perlu untuk melibatkan pemangku kepentingan eksternal/non-pemerintah?
2. Apa yang ingin kita dapatkan dari pemangku kepentingan non-pemerintah?
3. Apa kira-kira harapan/manfaat yang bisa didapatkan oleh pemangku kepentingan eksternal/non-pemerintah dari keterlibatan mereka dalam pelaksanaan SDGs?



Langkah 1.2. Menentukan siapa pemangku kepentingan non-pemerintah sebagai kelompok sasaran pelibatan

Pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pembangunan sangat beragam dengan berbagai kapasitasnya. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah SDGs baik berupa keterbatasan waktu, sumber daya manusia dan anggaran, maka perlu ada strategi menentukan target aktor non-pemerintah yang diharapkan terlibat dan berkontribusi signifikan dalam pencapaian SDGs.

Terdapat setidaknya dua tahapan untuk menentukan pemangku kepentingan non-pemerintah yang tepat untuk dilibatkan dalam pelaksanaan SDGs, yaitu: mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan non-pemerintah yang ada dan bekerja di wilayah tertentu dan memilih pemangku kepentingan non-pemerintah yang akan terlibat.

1. Identifikasi *Stakeholder*
Identifikasi *stakeholders* bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja aktor pembangunan yang berada di wilayah tersebut dan bagaimana profilnya. Informasi yang diharapkan dari stakeholder tersebut adalah:
 - A. Nama Lembaga
 - B. Jenis/unsur organisasi (Ormas, Bisnis, dll)
 - C. Bentuk organisasi berdasarkan badan hukum
 - D. Isu pembangunan utama organisasi
 - E. Jangkauan wilayah kerja
 - F. Sumber daya utama yang dimiliki
2. Prioritisasi Pemangku Kepentingan
Prioritisasi pemangku kepentingan bertujuan untuk menentukan sikap dan tindakan pengelola terhadap posisi pemangku kepentingan non-pemerintah yang terkait.

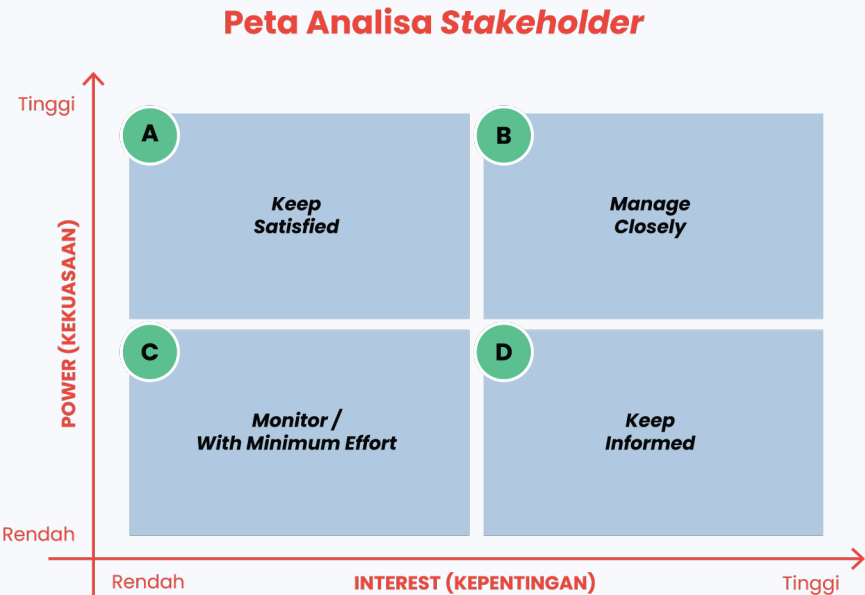
Beberapa *tool* yang dapat digunakan dalam melakukan prioritisasi pemangku kepentingan non-pemerintah. Salah satunya adalah analisa peta *stakeholders* dengan indikator kekuatan/kekuasaan dan kepentingan (*Power and Interest Matrix*). Alat analisis ini menggunakan dua indikator yaitu kepentingan dan pengaruh yang didefinisikan sebagai berikut:

- A. Kepentingan: Tingkat kepedulian terhadap keberhasilan/pencapaian hasil program.
- B. Pengaruh: Tingkat besar/kecilnya kekuasaan (otoritas) dan/atau ketersediaan sumber daya yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program.

Tabel 2. Matrik analisa pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan

No	Aktor	Pengaruh (Indikasi nilai +/-)	Keterangan	Kepentingan (Indikasi nilai +/-)	Keterangan

Berikut adalah tampilan analisis peta pemangku kepentingan non-pemerintah berdasarkan kepentingan dan pengaruh/kekuasaan/otioritas.



Gambar 3. Peta Analisa Pemangku Kepentingan

Berikut adalah peta pemangku kepentingan dan aksi yang dibutuhkan dalam menyikapinya:

Tabel 3. Pembacaan hasil analisa dan sikap terhadap pemangku kepentingan

Pembacaan Hasil	Sikap dan Perlakuan yang Dibutuhkan
<p>A : Otoritas tinggi, Kepentingan rendah.</p> <p>Pemangku kepentingan memiliki tingkat otoritas yang tinggi terhadap keberhasilan program, namun memiliki tingkat <i>concern</i>/kepedulian rendah terhadap pencapaian program.</p>	<p>Kepentingannya tetap dipelihara dan perlu diadvokasi atas pentingnya pencapaian program serta didorong untuk semakin banyak terlibat dalam program (<i>Keep satisfied</i>)</p>
<p>B : Otoritas tinggi, Kepentingan tinggi.</p> <p>Pemangku kepentingan memiliki tingkat otoritas yang tinggi terhadap keberhasilan program, dan juga memiliki tingkat <i>concern</i>/kepedulian yang tinggi terhadap pencapaian program.</p>	<p>Menjaga hubungan baik dan membangun keterlibatan aktif pemangku kepentingan (<i>Manage closely</i>)</p>
<p>C : Kepentingan tinggi, Otoritas rendah.</p> <p>Pemangku kepentingan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap tercapainya keberhasilan program, namun, otoritas yang dimiliki rendah.</p>	<p>Memberikan informasi yang cukup terhadap perkembangan program (<i>Keep informed</i>)</p>
<p>D : Kepentingan rendah, Otoritas rendah.</p> <p>Pemangku kepentingan memiliki tingkat kepentingan yang rendah terhadap tercapainya keberhasilan program, juga tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mendukung perubahan/pencapaian program.</p>	<p>Memantau dan melakukan komunikasi secukupnya (<i>Monitor/With minimum effort</i>)</p>

TAHAP 2. PERENCANAAN



Langkah 2.1. Menentukan hasil yang diharapkan dan keluaran yang jelas dari proses pelibatan yang akan dilakukan

Penentuan hasil dan keluaran dapat dilakukan dengan:

1. Merumuskan hasil akhir yang ingin dicapai yang merupakan cerminan dari tujuan pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.
2. Merumuskan keluaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang menunjang pada pencapaian hasil.

Berikut adalah alat bantu dan contoh penyusunan rencana kerja pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.

Tabel 4. Contoh matrik rencana kerja pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah

Strategi	Indikator (3)
Hasil (1)	
Pemangku kepentingan non-pemerintah berperan dan berkontribusi dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemangku kepentingan non-pemerintah dalam matrik 3 dalam RAD SDGs 2. Jumlah pemangku kepentingan nonpemerintah yang menyampaikan laporan evaluasi RAD SDGs
Keluaran (2)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluaran 1. Forum pemangku kepentingan nonpemerintah untuk SDGs terbentuk dan mekanisme koordinasi dan komunikasi disepakati 2. Keluaran 2. RAD SDGs memuat program dan kegiatan pemangku kepentingan non-pemerintah 3. Keluaran 3. Laporan hasil monev tengah tahunan melibatkan dan mencantumkan perkembangan kegiatan dan hasil pemangku kepentingan non pemerintah 4. Keluaran 4. Aktor non-pemerintah berkontribusi dalam penyediaan data indikator 5. Keluaran 5. Praktik baik pelaksanaan SDGs pemangku kepentingan non-pemerintah terdokumentasikan dalam laporan tahunan SDGs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah forum non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs 2. Jumlah pemangku kepentingan non-pemerintah yang menyampaikan matrik isian program dan kegiatan dalam RAD SDGs 3. Jumlah pemangku kepentingan non-pemerintah yang menyampaikan matrik isian monitoring dan evaluasi RAD SDGs 4. Data hasil pembangunan dari pemangku kepentingan non pemerintah 5. Jumlah praktik baik pemangku kepentingan non-pemerintah yang terdokumentasikan dalam laporan tahunan
.....

Keterangan:

- (1) Hasil: Tuliskan pernyataan hasil akhir yang ingin dicapai dari proses pelibatan pemangku kepentingan non pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.
- (2) Keluaran: Tuliskan pernyataan hasil nyata dari kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaksana pelibatan pemangku kepentingan non pemerintah dalam pelaksanaan SDGs, yang merupakan penunjang bagi pencapaian hasil.
- (3) Indikator: Pernyataan kuantitatif untuk mengukur keberhasilan strategi (hasil dan keluaran).



Langkah 2.2. Menentukan cara pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs

Pada tahap ini, menjelaskan mengenai cara bagaimana menarik pemangku kepentingan non-pemerintah untuk terlibat dan berperan dalam pelaksanaan

SDGs. Cara yang dilakukan melalui komunikasi untuk menyampaikan pemikiran dan ide agar dapat dipahami oleh target audiens. Komunikasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pemangku kepentingan non-pemerintah memahami pentingnya peran dan kontribusinya dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan SDGs.

Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan dengan cara verbal (lisan), tertulis dan dalam bentuk visual (Roeder, 2013). Namun demikian, komunikasi juga dapat melampaui dari kebiasaan komunikasi verbal, tertulis dan visual, yaitu berbentuk non-verbal dan kinestetik atau berbasis pada pengalaman. (Roeder, 2013):

Jenis-Jenis Komunikasi

1. Verbal:

- A. Komunikasi verbal langsung (*In person*)
- B. Komunikasi verbal melalui telepon
- C. Komunikasi verbal melalui media *online* dan teknologi berbasis telepon.

2. Non-Verbal:

- A. Ekspresi wajah (*Facial expression*)
- B. Bahasa tubuh (*Body language*)
- C. Bahasa isyarat (*Gesture*)

3. Tertulis:

- A. Tertulis melalui media elektronik
- B. Tertulis melalui media kertas

4. Kinestetik/berbasis pengalaman:

- A. *Training* langsung
- B. Studi kasus
- C. Simulasi aktif

5. Visual:

- A. *Chart* atau grafik
- B. Gambar

Gambar 4. Jenis-jenis komunikasi

Dari berbagai bentuk komunikasi di atas, dapat dipastikan bahwa komunikasi verbal melalui pertemuan langsung adalah yang paling kuat. Pertemuan langsung secara verbal adalah cara terbaik dan paling efektif untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan target sasaran yang dituju.



Langkah 2.3. Menyusun jadwal proses pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah

Jadwal yang jelas merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan strategi pelibatan *stakeholder* dalam rangka mengantisipasi perencanaan yang baik dan dukungan sumber daya yang mencukupi.

Jadwal disusun berdasarkan ketersediaan waktu dan durasi target yang diharapkan. Jadwal dapat menggunakan bulan atau minggu sesuai dengan rencana waktu masing-masing daerah.

Tabel 5. Contoh matrik jadwal pelaksanaan kegiatan pelibatan

Strategi			Waktu Pelaksanaan (Minggu)							
Hasil	Keluaran	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	(2)	(3)	(4)							
Pemangku kepentingan non-pemerintah berperan dan berkontribusi dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs	Output 1: Terbentuknya forum pemangku kepentingan non-pemerintah untuk SDGs dan disepakatinya mekanisme koordinasi	Pertemuan <i>stakeholder</i> (sosialisasi peran penting pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs)		x						
		Pertemuan <i>stakeholder</i> untuk menyepakati pembentukan forum SDGs			x					
	Output 2: Adanya kesepakatan mekanisme koordinasi forum pemangku kepentingan non-pemerintah	Workshop penyusunan mekanisme koordinasi				x				
		Pertemuan <i>stakeholder</i> untuk penyusunan agenda kerja forum					x			

Keterangan:

- (1) Hasil: Tuliskan pernyataan hasil akhir yang ingin dicapai dari proses pelibatan pemangku kepentingan non pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.
- (2) Keluaran: Tuliskan pernyataan hasil nyata dari kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaksana pelibatan pemangku kepentingan non pemerintah dalam pelaksanaan SDGs, yang merupakan penunjang bagi pencapaian hasil.
- (3) Kegiatan: Isikan bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menghasilkan keluaran.
- (4) Waktu pelaksanaan: Isikan indikasi waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.



Langkah 3.1. Pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs

1. Aturan dasar pelaksanaan pertemuan

Pertemuan langsung secara verbal merupakan salah satu metode komunikasi yang paling disarankan untuk pelibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGs. Efektivitas pelaksanaan pertemuan sangat menentukan terjalinnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan menjadi penentu pengambilan keputusan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGs. Untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas pertemuan, berikut adalah lima aturan dasar pelaksanaan pertemuan yang dapat diikuti: (Baugh, 2015)

- A. Mempersiapkan *detail* agenda, lengkap dengan waktu dan topiknya dan menyampaikannya kepada pemangku kepentingan sebelum pertemuan dilaksanakan.
- B. Ketat pada agenda dan waktunya.
- C. Membangun aturan main pertemuan pada permulaan pertemuan.
- D. Menunjuk seseorang untuk mencatat dan mendokumentasikan semua keputusan pertemuan.
- E. Menyampaikan catatan pertemuan lengkap dengan kesepakatan atau keputusan dan rencana tindak lanjut kepada *stakeholder* dan kemudian lakukan pemantauan atas pelaksanaannya.

2. Pertanyaan pemandu untuk menggali informasi dari pemangku kepentingan

Selain aturan dasar untuk memastikan efektivitas pertemuan, hal lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengelola pertemuan itu sendiri. Pada saat melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, berikut adalah beberapa hal yang dapat memandu pelaksana untuk menggali informasi dari peserta sesuai dengan yang diharapkan dalam membangun pelibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan SDGs:

- A. Menggali bagaimana respon pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan SDGs.
- B. Menggali pandangan dan tanggapan dari peserta tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan SDGs.
- C. Menggali dari peserta tentang apa harapan dan kebutuhan mereka terhadap sekretariat SDGs pada khususnya atau pada pemerintah pada umumnya.
- D. Menggali manfaat apa saja yang dapat diambil atau dapat dirasakan oleh

- pemangku kepentingan dari adanya keterlibatan dan keberhasilan SDGs.
- E. Mengidentifikasi apa saja potensial dukungan dari *stakeholder* terhadap pelaksanaan dan pencapaian SDGs.

3. Penentu keberhasilan pelaksanaan pelibatan

Beberapa hal penting yang dapat menentukan keberhasilan proses pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs diantaranya adalah:

- A. Menyampaikan secara jelas tentang maksud dan tujuan pelibatan dalam pelaksanaan SDGs;
- B. Membangun posisi yang setara antara pemerintah dan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs;
- C. Mendengarkan aspirasi dan ekspektasi pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs;
- D. Pemerintah daerah memposisikan diri sebagai fasilitator dan katalisator bagi pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di daerah.



Langkah 3.2. Monitoring pelaksanaan kegiatan pelibatan

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan proses pelibatan, diperlukan proses monitoring secara berkala. Monitoring bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, menemukan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan menentukan upaya penyelesaian kendala dalam bentuk rekomendasi dalam bentuk aksi yang terukur dan kongkrit.

Monitoring pelaksanaan proses pelibatan dapat dilakukan dengan alat bantu sebagai berikut:

Tabel 6. Monitoring pelaksanaan proses pelibatan

Hasil	Keluaran	Kegiatan	Capaian		Kendala yang ditemui	Rekomendasi
			Realisasi pelaksanaan kegiatan	Hasil yang dicapai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

- (1) Hasil: Tuliskan pernyataan hasil akhir yang ingin dicapai dari proses pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.
- (2) Keluaran: Tuliskan pernyataan hasil nyata dari kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaksana pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs, yang merupakan penunjang bagi pencapaian hasil.
- (3) Kegiatan: Isikan bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menghasilkan keluaran.
- (4) Realisasi pelaksanaan kegiatan: Tuliskan status dari kegiatan yang direncanakan. Status dapat terdiri dari: 1) Terlaksana; 2) Dalam proses menuju pelaksanaan, atau 3) Belum terlaksana.
- (5) Hasil yang dicapai: Jika realisasi menunjukkan terlaksana atau dalam proses pelaksanaan, maka tuliskanlah hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut.
- (6) Kendala yang dihadapi: Tulislah pernyataan kendala yang dihadapi oleh pelaksana terhadap kegiatan yang direncanakan.
- (7) Rekomendasi: Berdasarkan kendala yang ditemui, susunlah rekomendasi aksi untuk penyelesaian kendala yang ditemui tersebut.

TAHAP 4. EVALUASI



Langkah 4.1. Mengevaluasi pelaksanaan proses pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs

Proses akhir dari rangkaian tahapan atau langkah pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs adalah melakukan review atau evaluasi terhadap upaya yang sudah dilakukan.

Evaluasi dilakukan untuk meninjau pendekatan yang telah disusun, mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, menemukan tantangan yang dihadapi, serta menentukan langkah selanjutnya untuk perbaikan ke depan. Proses evaluasi ini dapat juga berperan dalam membangun kepercayaan dan pembelajaran.

Berikut adalah alat bantu matrik untuk evaluasi pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.

Tabel 7. Matrik evaluasi pelaksanaan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pelaksanaan SDGs

Identifikasi Masalah (1)		Rekomendasi Penyelesaian Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Kategori	Deskripsi Masalah		
(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumber Daya Manusia			
2. Kelembagaan			
3. Keuangan			
4. Operasional			
5. Regulasi			
6. Politik			
Lainnya			

Keterangan:

- (1) Identifikasi Masalah: Merupakan penjabaran dari masalah yang ditemui/dihadapi dalam pelaksanaan proses pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah.
- (2) Kategori: Kategori dapat dipilih lebih dari satu sesuai dengan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pelibatan. Sebutkan kategori lainnya jika ditemukan dan diperlukan.
- (3) Deskripsi Masalah: Diisi deskripsi masalah yang ditemui dalam pelaksanaan proses pelibatan untuk mencapai tujuan pelibatan aktor pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.
- (4) Rekomendasi Penyelesaian Masalah: Tuliskan saran strategis untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.
- (5) Rencana Tindak Lanjut: Diisi dengan rencana tindak lanjut konkret yang perlu dilakukan untuk melaksanakan strategi penyelesaian masalah dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Baugh, A. (2015). *Stakeholder Engagement: The Game Changer for Program Management*. Auerbach Pub.

IAP2. (2018). [www.iap2.org.au](https://iap2.org.au/wp-content/uploads/2020/01/2018_IAP2_Spectrum.pdf). Retrieved from https://iap2.org.au/wp-content/uploads/2020/01/2018_IAP2_Spectrum.pdf.

Roeder, T. (2013). *Managing Project Stakeholders: Building A Foundation To Achieve Project Goals*. New Jersey: John Wiley & Son, Inc.

UNDESA & UNITAR. (2020). *Stakeholder Engagement & the 2030 Agenda: A critical Guide*. United Nations.

UNESCAP. (2018). *Effective Stakeholder Engagement for the 2030 Agenda: Training Reference Material*. Bangkok: UNESCAP.



Buku Rujukan
Pelibatan Aktor Non-Pemerintah
Dalam Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah



**Kementerian PPN/
Bappenas**



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit GIZ GmbH